

Membaca Sejarah Pemindahan Ibu Kota

Beberapa tahun lalu di masa kepemimpinannya periode pertama, dalam sebuah rapat terbatas, Presiden Joko Widodo pernah melontarkan keyakinan untuk memindah ibu kota negara dari DKI Jakarta ke daerah lain. Pemerintah kemudian berkomitmen memetakan kriteria wilayah yang tepat untuk menjadi ibu kota baru. Melalui Bappenas, pemerintah menyusun kajian pemindahan ibu kota negara. Rencananya ibu kota baru itu akan lebih berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara untuk sektor jasa keuangan, perdagangan, dan industri akan tetap di Jakarta.

Cita-cita tersebut tak lama lagi terwujud. Dalam rapat terbatas pada tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan kepastian pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Lokasi resminya diumumkan pada 26 Agustus 2019 yakni sebagian wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Pemerintah bergerak cepat, Nusantara sebagai nama ibu kota baru diumumkan pada 17 Januari 2022 dan keesokan harinya UU Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan oleh DPR. Selanjutnya pada 10 Maret 2022, Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN.

Untuk menandai proses resmi pembangunan IKN, pada tanggal 14 Maret 2022 digelar prosesi Kendi Nusantara di Titik Nol IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam upacara tersebut sebanyak 34 tanah dan air yang dibawa dari 34 provinsi disatukan se-

bagai simbol Nusantara yang meliputi wilayah dari ujung Aceh sampai Papua. Bahkan Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri, gubernur, kepala dan wakil kepala Otorita IKN akan berkemah di situ. Jika melihat sejarah, wacana pemindahan ibu kota negara sebenarnya bukanlah hal yang baru namun hingga kini baru akan terwujud.

Sejarah panjang

Pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah mewacanakan pemindahan ibu kota. Setelah kepulangannya dari KTT G-20, beliau sangat terkesan dengan Astana, ibu kota Kazakhstan. Astana merupakan kota baru yang sengaja dibangun dengan infrastruktur yang baik dan memadai sebagai ibu kota negara. Presiden SBY ber alasan Jakarta sering dilanda banjir, kemacetan, dan kepadatan penduduknya tidak terkendali lagi.

Alasan itu sebenarnya sudah lama dirasakan, pada masa Presiden Suharto pernah muncul wacana Jonggol di Bogor sebagai alternatif ibu kota negara. Pemilihan kota ini lebih didasarkan pada biaya kepindahan. Jarak yang tidak terlalu jauh akan menekan ongkos kepindahan. Istana Bogor yang luas juga dapat difungsikan sebagai kantor presiden sekaligus istana negara. Selain bebas banjir, Istana Bogor dekat dengan Kebun Raya sehingga dirasa sangat tepat dari sudut pendekatan lingkungan.

Jauh sebelumnya, Presiden Sukarno sempat mewacanakan Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai ibu kota baru. Gagasan itu disampaikan ketika beliau meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah tahun 1957. Dua kali Bung Besar berkun-

jung ke Palangkaraya untuk melihat secara langsung potensi kota ini. Bahkan sebagai persiapan, beliau lantas mengonsep bandar udara Panarung yang kini bernama Tjilik Riwoot di Palangkaraya sebagai bandar udara internasional.

Kendati telah lama bergulir berbagai wacana, namun kala itu pemindahan ibu kota negara belum terealisasi. Padahal tidak sedikit pihak yang mendukungnya. Sebagai ibu kota negara sejak proklamasi (meskipun sejarah mencatat Yogyakarta dan Bukittinggi pernah berperan pula sebagai ibu kota negara), maka Jakarta mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jakarta menjadi kota metropolitan, bahkan saat ini megapolitan. Urat nadi semua sektor kehidupan di Indonesia memiliki jantungnya di Jakarta.

Terlalu kenyang Jakarta menikmati kemajuan positif maupun dampak negatif perkembangan kota. Pembangunan fasilitas kota dan infrastruktur yang besar-besaran, pertumbuhan ekonomi warga, beragamnya lapangan kerja, tersedianya berbagai alat pemenuh kebutuhan dan jasa, hingga masalah-masalah perkotaan seperti rumah-rumah kumuh, pencemaran lingkungan, habisnya lahan terbuka hijau, tingginya kriminalitas, banyaknya gelandangan dan pengemis, kemacetan, dan banjir yang menjadi langganan di Jakarta. Sudah lama Jakarta dianggap harus segera pensiun menyandang predikat ibu kota negara.

Bukan sulap

Akhirnya harus diakui bahwa memindah ibu kota negara tidak seperti pertunjukan sulap. Faktor utama ialah pemindahan ibukota tentu membutuhkan dana

yang tidak sedikit. Apalagi pandemi Covid-19 cukup menghantam perekonomian negeri. Belum lagi biaya yang diperlukan untuk membangun infrastruktur dari istana kepresidenan, gedung-gedung perkantoran, rumah dinas, hingga pengadaan sarana transportasi dan komunikasi yang benar-benar memadai untuk mendukung kelancaran jalannya pemerintahan negara.

Hal penting lainnya ialah para pejabat dan pegawai pemerintahan dari menteri hingga staf tentu harus mengikuti kepindahan demi mudahnya koordinasi dan efektifitas kerja. Lantas perlu dipikirkan pula tempat tinggal bagi mereka bersama keluarganya di tempat yang baru. Perlu perhatian serius untuk merealisasikan wacana ini. Lebih penting lagi, pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan diharapkan juga mendorong upaya pembangunan yang merata demi cita-cita keadilan sosial bagi seluruh wilayah dan rakyat Indonesia (*welfare state*).



Oleh: Hendra Kurniawan, M.Pd.,
Dosen Pendidikan Sejarah
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.